BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berbicara mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan itu semua telah diatur dalam Undang-Undang serta hukum yang berlaku di Negara ini. Pencemaran lingkungan adalah suatu tindakan yang sangat merugikan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan dalam proses kehidupannya. Pencemaran lingkungan banyak yang terindikasi diakibatkan oleh kebanyakan dari tingkah laku manusia itu sendiri, yang bahkan ia mengetahui dampak dari perbuatannya itu. Indikasi tingkah laku manusia seperti membuang sampah di sembarangan tempat, pembuangan limbah rumah tangga yang berlebihan, pembakaran sampah dan jerami, dan lain-lain¹.

Selain dari perbuatan yang telah disebutkan tadi ada lagi bentuk pencemaran yang lebih parah dan lebih berdampak berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup, seperti pembuangan limbah industri kedalam air sungai yang mengakibatkan air menjadi tercemar oleh bahan kimia berbahaya, limbah asap oleh

¹Rachmat Hidayat S yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah, Palembang, 2014), Hlm 29-30

perusahaan yang menimbulkan polusi udara yang mengakibatkan kualitas udara memburuk untuk dikonsumsi atau pembuangan limbah bahan kimia berbahaya yang mengakibatkan dampak negatif dari pencemaran lingkungan ini maka sudah seharusnya para pelaku atau perusahaan industri yang melakukan pencemaran lingkungan mendapatkan sanksi yang berat terhadap dampak yang ditimbulkan dari apa yang mereka lakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, diatur larangan –larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan, larangan-larangan tersebut diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan:²

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Memsaukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.

²Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik - delik di Luar KUHP*, Kencana, (Jakarta : 2016)

- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal:³

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3. 000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(Catatan: Setiap orang yang dimaksud dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana lingkungan meliputi orang perseorangan dan korporasi. Adapun perumusan tindak pidananya ada yang dirumuskan secara materiil artinya tindak pidana terwujud apabila ada akibat seperti rumusan Pasal 98 ayat (1)

³Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik - delik di Luar KUHP*, Kencana, (Jakarta : 2016), Hlm 159

tersebut, dan ada pula yang dirumuskan secara formil artinya tindak pidana sudah terwujud apabila perbuatan itu sudah dilakukan dan tidak perlu ada akibat. Pasal 20 ayat (1) penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Ayat (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi; a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi). Dimaksud dengan **Baku mutu kerusakan lingkungan hidup** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup. (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Adapun **Baku mutu air** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada dan/atau harus unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. **Baku mutu udara ambien** adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien. **Baku mutu air laut** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut). Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, kebauan).

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Setiap orang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah perusak lingkungan akibat pembangunan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan sanksi, antara lain: sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Disamping dijelaskan mengenai ketentuan sanksi, dalam penegakan hukum didasarkan kepada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan kaedah lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah menegaskan 3 (tiga) langkah penegak hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup.

Aspek hukum administratif pengendalian pencemaran B3 di wilayah yang berada dibawah Kedaulatan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan pengendalian pencemaran bahan berbahaya dan beracun mencakup ketentuan mengenai pengelolaan B3 dan limbah B3, Penanggulangan dan pemulihan pencemaran B3, larangan memasukkan B3 dan limbah

⁴Ummah Khaira, 2017, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 3 September

B3, pengawasan B3, sanksi administratif bagi pencemar B3 dan hak gugat pemerintah dan gugatan administratif berkaitan pencemaran B3.

Berdasarkan kajian teori hukum pidana, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* terhadap setiap pelanggaran lingkungan. Pendapat ini didasarkan pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan merupakan urusan pemerintah yang berwujud sebagai tindakan administratif dan para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif.

Kemudian sanksi perdata berupa pembayaran sejumlah ganti rugi atas kerugian materil yang dialami oleh pihak korban. Sanksi pidana baru akan diterapkan kepada pihak pencemar apabila sanksi administratif dan sanksi perdata tidak mampu berfungsi dengan baik. Jadi ada tahapan penjatuhan sanksi kepada pencemar dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, jika tindak pidana oleh badan usaha, tindak pidana bisa dijatuhkan hukuman berupa denda dan hukuman tambahan berupa tindakan tata tertib berupa:⁵

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana

⁵Ummah Khaira, 2017, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 3 September, Hlm 460

d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau

Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Perlindungan dan pengelolaan dilakukan secara terpadu mencakup bidang-bidang lingkungan yang bersih.

B. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Setiap perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kejahatan moral, kriminalitas atau tindakan pidana adalah sebagai akibat gejala manusia yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia yang dilakukan oleh manusia pula. Dalam melenyapkan segala bentuk penyimpangan merupakan hal yang sangat sukar untuk diwujudkan, namun kita tetap berusaha supaya kejahatan tidak merajalela⁶.

Dalam hukum Islam untuk tindak pidana sering menggunakan kata *jarimah* yaitu segala syara (melakukan hal-hal dilarang atau meninggalkan hal-hal yang wajib). Larangan –

⁶M. Razik Ilham, “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencurian Airan Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017), Hlm 37

larangan syara tersebut bisa berbentuk mealukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan⁷.

Fiqh jinayah sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti yang luhur, karena akhlak dan budi pekerti yang luhur merupakan tiang dalam menegakkan masyarakat. Oleh karenanya setiap perbuatan yang bertentangan dengan ahlak sangat dicela dan diancam dengan hukuman. Sebaliknya hukum positif tidaklah demikian. Dalam hukum positif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan dengan ahlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap suatu tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentraman dalam masyarakat, sebagai contoh perbuatan zina⁸.

Akan tetapi dalam hal tindak pidana pencemaran lingkungan sanksi atau pun hukuman yang diberikan sangat berbeda dengan hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara. Karena menurut *fiqh jinayah* yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan digolongkan yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (hukuman yang sudah ditentukan syara).

Hukum Pidana Islam juga mengelompokkan jarimah atau tindak pidana dari niat si pelaku yaitu, perbuatan yang disengaja dan perbuatan yang tidak sengaja.

⁷Cecep Enggar Lukita, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentag Merek*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2018)

⁸Cecep Enggar Lukita, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentag Merek*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2018), Hlm 43

Bila dilihat tujuan dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah⁹.

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَعَثُّوْا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S. Asy-Syu'ara : 183)¹⁰

Dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan dan menyor manusia melakukan perbuatan maksiat-maksiat.

Fiqh jinayah bukan hanya menitik beratkan pada sanksi berat ringannya suatu hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara* tanpa melihat sebab atau pun faktor yang melatar belakanginya, seperti faktor kesengajaan dan faktor keterpaksaan (darurat)¹¹.

1. Faktor kesengajaan (kekerasan)

⁹Mujamma'Raja Fahd, *Tafsir Muyassar Memahami Al-Qur'an dengan terjemahan dan Penafsiran Palinh Mudah*, DARUL HAQ, (Jakarta : 2016)

¹⁰Mujamma'Raja Fahd, *Tafsir Muyassar Memahami Al-Qur'an dengan terjemahan dan Penafsiran Palinh Mudah*, DARUL HAQ, (Jakarta : 2016), Hlm 210

¹¹Cecep Enggar Lukita, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek”*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2018), Hlm 45

Faktor kesengajaan merupakan suatu unsur dalam pencemaran lingkungan yang dapat di golongkan sebagai *Jarimah Hirabah* dalam *fiqh jinayah*, yang dilakukan seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan di ancam dengan sanksi yang diberikan pada *jarimah* ini berupa *ta'zir*, apabila ia hanya mengintimidasi tanpa mengambil harta dengan kekerasan namun tidak sambil membunuh. Bila ia membunuh tanpa mengambil harta maka sanksinya adalah hukuman mati.

2. Faktor keterpaksaan (darurat)

Keadaan terpaksa (darurat) yakni suatu perbuatan yang mana pelaku dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dikarenakan faktor ekonomi.

Selain seorang hakim melihat dari unsur-unsur tindak pidannya, dampak dari akibat yang dihasilkan dari perbuatannya dan dalam menentukan sanksi *ta'zir* juga melihat dari niat si pelaku, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan ini mejadi tolak ukur seorang hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Karena unsur-unsur tersebut dilarang dalam syari'at Islam. Oleh karena itu hukum Islam menetapkan hukuman terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang didalamnya terdapat unsur-unsur berupa hukuman *ta'zir*.

Hukuman *ta'zir* ini dapat dilakukan menurut keputusan hakim muslim misalnya karena megejek orang lain, menghina orang, menipu dan sebagainya. Dengan demikian hukuman *ta'zir* ini keadaannya lebih ringan dari 40 kali dera yang memang sudah

ada dasarnya dari Nabi terhadap mereka yang minum-minuman keras. Berarti dibawah 40 kali cambuk itu dinyatakan sebagai hukuman *ta'zir* (yaitu dipukul yang keras). Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas hukumannya misalnya dengan gadis berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100 kali) dan lainnya adalah termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan *hudud* (hukum Allah). Adapun yang lebih ringan disebut *ta'zir* yang dilakukan menurut pertimbangan hakim muslim¹².

Jadi sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan dalam hukum Islam dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya adalah pencegahan dan pendidikan untuk menghalangi si pelaku agar tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan membuatnya jera. Maka berat ringannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat dan Negara, sehingga sasaran dan tujuan penghukuman tersebut bisa tercapai. Para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Menurut mazhab Hanafi penerapan sanksi *ta'zir* itu diserahkan kepada Ulil Amri termasuk batas minimal dan

¹² Fahrurroji, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Penjual Pangan Tercegar Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2015)

maksimalnya. Dalam hal ini harus tetap dipertimbangkan variasi hukumannya sesuai dengan perbedaan jarimah dan perbedaan pelakunya. Perbedaan *jarimah* dalam kaitannya dengan penerpan sanksi *ta'zir* artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan dengan jarimah yang dilakukan terhukum. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bila *jarimah ta'zir* yang dilakukan itu berkaitan dengan jilid, maka jilidnya harus kurang dari batas jilid had zina. Akan tetapi, bila *jarimah ta'zir* yang dilakukan itu bukan jarimah hudud, maka diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri sesuai dengan tuntutan kemaslahatan umum.

Perbedaan pelaksanaan *jarimah ta'zir* juga harus dipertimbangkan. Hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya, karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama, baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya. Disamping itu, untuk menjerahkan si pelaku sudah tentu harus tidak sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, ada yang harus dijilid ada harus dikurung ada yang harus dicela, dan sebagainya. Menurut mazhab Hanafi dalam penerapan sanksi ini harus diperhatikan stratifikasi manusia, yakni ada empat:

1. *Al-Ashraf* (orang-orang yang paling mulia), yaitu para ulama, mereka cukup diberi penjara oleh hakim atau diajukan ke meja hijau dan hal ini baginya sudah tentu pelajaran yang pahit.
2. *Karimun* (orang-orang yang mulia), yaitu pemimpin yang harus diberi sanksi yang lebih berat daripada sanksi yang

diberikan kepada para ulama, yakni bisa dengan peringatan yang keras atau dihadirkan di depan pengadilan.

3. *Al-Awsat* (pertengahan), bisa dengan peringatan keras atau penjara.
4. *Al-Akhsa* (rendah), bisa dengan dipenjara.

Derajat-derajat ini sesungguhnya hanya merupakan klasifikasi manusia dalam kaitannya dengan pengaruh sanksi bagi dirinya dan tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan manusia di depan hukum, karena semuanya dikena hukuman, hanya saja dalam rangka untuk mencapai tujuan hukuman maka stratifikasi ini diperlukan. Hal ini dibuktikan oleh Ibn Abidin yang menyatakan bila orang yang mulia mengulangi lagi kejahatannya, maka bisa dikenai sanksi jilid seperti orang kebanyakan.

Di kalangan mazhab Maliki ada prinsip bahwa sanksi *ta'zir* itu berbeda-beda jenisnya, jumlahnya, dan sifatnya karena perbedaan kondisi pelakunya, bahkan al-Qarafi menambahkan bahwa perbedaan waktu dan tempat terjadinya kejahatan itu membawa perbedaan sanksi *ta'zir*, terutama sekali *ta'zir* yang berkaitan dengan adat kebiasaan negeri tertentu.

Di kalangan mazhab Hanbali *ta'zir* juga berbeda-beda, baik jenis, kadar maupun sifatnya sesuai dengan jarimah dan keadaan pelakunya. Disamping itu *ta'zir* juga diserahkan kepada Ulil Amri untuk menerapkannya dan untuk memilih jenis, kadar, dan sifat *ta'zir* yang sesuai dengan tujuan *ta'zir*. Seperti dinyatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa *ta'zir* itu diserahkan kepada Ulil Amri sesuai dengan besar kecilnya dosa. Bila dosanya makin besar, maka

sanksinya makin besar. Dan disesuaikan dengan keadaan pelakunya, bila pelakunya sering melakukan kejahatan maka sanksinya lebih berat.

Di kalangan mazhab Syafi'i *ta'zir* itu pada prinsipnya diserahkan kepada ijtihad Ulil Amri, baik tentang jenisnya maupun tentang kadarnya, disesuaikan dengan keadaan para pelakunya yang berbeda-beda dan juga disesuaikan dengan perbedaan jarimahnyanya. Imam Mawardi menyatakan bahwa *ta'zir* itu berbeda dengan dengan hudud dalam tiga hal, yaitu:

1. Memberikan sanksi *ta'zir* kepada orang yang baik-baik itu lebih ringan dari pada sanksi *ta'zir* kepada orang yang sering melakukan kejahatan, sedangkan dalam hudud tidak ada perbedaan.
2. Dalam *hudud* tidak boleh diberikan maaf, sedangkan dalam *ta'zir* ada kemungkinan pemberian maaf.
3. Had itu memungkinkan bisa menimbulkan kerusakan tubuh dan jiwa terhukum, sedangkan dalam *ta'zir* terhukum tidak boleh sampai mengalami kerusakan itu.

Di kalangan mazhab Syafi'i bila hakim memilih hukuman buang sebagai hukuman *ta'zir* juga tidak boleh melampaui batas waktu satu tahun. Sedangkan di kalangan mazhab Maliki yang diserahkan itu meliputi macamnya hukuman. Hanya saja bila sanksi yang dipilih adalah sanksi jilid, maka harus dikaitkan dengan batas tertinggi had dan tidak boleh melampauinya.

Pendapat-pendapat para ulama di atas juga menunjukkan bahwa meskipun sanksi *ta'zir* itu diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya akan tetapi ia harus mempertimbangkan banyak

hal supaya sanksinya tidak melampaui batas dan kurang dari batas. Jadi secara singkat hubungan antara hakim dengan si terhukum dalam kasus *ta'zir* ini seperti hubungan antara seorang tabib dengan pasiennya. Obat yang diberikan, baik dosisnya maupun jenisnya, harus sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan mazhab di atas jenis hukuman sanksi *ta'zir* mazhab Syafi'i lebih ringan dari mazhab yang lain karena di kalangan mazhab Syafi'i hukuman sanksi *ta'zir* lebih diserahkan kepada Ulil Amri (penguasa) atau Hakim yang menentukan jenis hukumannya.